



Analisis Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran *Pra-Pep* dengan Saat Penerapan Program Efisiensi Pemerintah Berlaku di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen : Tahun 2024 - 2025

Fitri Nurul Hidayah^{1*}, Ari Nurul Fatimah²

Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar^{1,2}

*Email: fitrinurul231103@gmail.com, ari.nurul.fatimah@untidar.ac.id

Diterima: 18-03-2026 | Disetujui: 28-03-2026 | Diterbitkan: 30-03-2026

ABSTRACT

This study compares the budget and its realization before and during the implementation of the Government Efficiency Program (PEP) at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Kebumen Regency in 2024–2025. A qualitative case study method was applied through interviews, observations, and documentation. The results indicate a 40–50% efficiency in operational expenditures, particularly in goods and services, meeting consumption, office services, and office equipment/materials. Efficiency strategies included tightening non-essential procurement, digitalizing meetings, and eliminating non-core honorarium. This policy led to more disciplined financial management and opened opportunities for reallocating funds to priority programs without reducing the quality of public services.

Keywords: *Budget Efficiency, Budget Realization, DPMPTSP Kebumen Regency, Government Efficiency Program (PEP), Operational Expenditure, Meeting Digitalization, Regional Financial Management.*

ABSTRAK

Penelitian ini membandingkan anggaran dan realisasi sebelum serta saat penerapan Program Efisiensi Pemerintah (PEP) di DPMPTSP Kabupaten Kebumen tahun 2024–2025. Metode studi kasus kualitatif digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan efisiensi 40–50% pada belanja operasi, terutama pada pos barang dan jasa, konsumsi rapat, jasa kantor, serta perabot/bahan kantor. Strategi efisiensi dilakukan dengan pengetatan pengadaan non-esensial, digitalisasi rapat, dan penghapusan honorarium non-pokok. Kebijakan ini menghasilkan pengelolaan keuangan lebih disiplin serta membuka peluang realokasi dana ke program prioritas tanpa menurunkan kualitas layanan publik.

Kata kunci: Efisiensi Anggaran, Realisasi Anggaran, DPMPTSP Kabupaten Kebumen, Program Efisiensi Pemerintah (PEP), Belanja Operasi, Digitalisasi Rapat, Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Hidayah, F. N., & Fatimah, A. N. (2026). Analisis Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pra-Pep dengan Saat Penerapan Program Efisiensi Pemerintah Berlaku di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen : Tahun 2024 - 2025. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 207-213. <https://doi.org/10.63822/30fafj43>

*Analisis Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pra-Pep dengan Saat Penerapan Program Efisiensi
Pemerintah Berlaku di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen :
Tahun 2024 - 2025
(Hidayah, et al.)*

PENDAHULUAN

Cara kerja pemerintah telah dipengaruhi oleh globalisasi. Teknik tata kelola konvensional telah berubah sebagai akibat dari interaksi internasional yang semakin terbuka, penyebaran informasi yang cepat, dan kemajuan dalam teknologi komunikasi. Transparansi dan akuntabilitas publik menjadi semakin penting sebagai akibat dari globalisasi, yang memiliki konsekuensi serius. Melalui berbagai media, individu sekarang dapat dengan mudah memperoleh informasi, mengevaluasi kebijakan pemerintah lain, dan menyatakan tidak setuju mereka (Mendrofa & Oci, 2026).

Untuk mencapai efisiensi pengeluaran dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 (Instruksi Presiden 01, 2025). Dalam menghadapi perubahan ekonomi domestik dan internasional, kebijakan ini merupakan taktik penting yang digunakan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas anggaran dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik. Semua instansi pemerintah pusat dan daerah harus melakukan perubahan signifikan selama tahap persiapan dan pelaksanaan anggaran agar dapat menerapkannya. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian dan Efisiensi Pengeluaran Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, yang menawarkan pedoman lebih spesifik bagi pemerintah daerah, mendukung kebijakan ini di tingkat daerah.

Menanggapi kebijakan nasional ini, Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagai komponen penting dari sistem pemerintahan Indonesia, membuat peraturan daerah yang sesuai. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, sedangkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2024 memberikan rincian lebih lanjut. Namun, Pemerintah Kabupaten Kebumen mengubah spesifikasi APBD melalui Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2024 menyusul diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang terdiri dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP), mulai menerapkan efisiensi anggaran yang lebih ketat dengan perubahan ini.

DPMPTSP Kabupaten Kebumen berperan krusial sebagai penggerak utama layanan investasi dan perizinan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta target kinerja daerah. Kinerjanya tercatat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Tahun 2024, yang dijadikan dasar evaluasi program dan kegiatan. Sebelum program efisiensi ketat diterapkan pada 2025, pengelolaan anggaran di DPMPTSP masih mengandalkan mekanisme yang lebih fleksibel. Kini, dengan tuntutan efisiensi, dinas ini harus mengoptimalkan alokasi dan penyerapan anggaran untuk mencapai sasaran pembangunan daerah, tanpa menurunkan mutu pelayanan publik. Ini selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, yang menekankan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam dampak PEP terhadap efisiensi anggaran. Pendekatan deskriptif komparatif membandingkan data anggaran dan realisasi periode pra-PEP (2024) dengan saat PEP berlaku (2025). Tujuannya mengidentifikasi selisih

*Analisis Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pra-Pep dengan Saat Penerapan Program Efisiensi
Pemerintah Berlaku di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen :
Tahun 2024 - 2025
(Hidayah, et al.)*

anggaran, faktor penghambat, dan efisiensi yang dicapai. Objek penelitian ini yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen yang berlokasi di Jalan Indrakila Nomor 10 Kabupaten Kebumen. Penelitian ini dilaksanakan selama kegiatan magang yaitu dari tanggal 05 Januari 2026 sampai dengan 13 Maret 2026.

Menurut Anggeraini et al. (2020) data penelitian dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Data primer

Informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber asli oleh peneliti disebut sebagai data primer. DPMPTSP menyediakan data awal untuk penelitian ini melalui wawancara semi-terstruktur dengan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, tentang Program Efisiensi Pemerintah (PEP), serta observasi langsung terhadap prosedur penganggaran dan pelaporan realisasi anggaran di kantor instansi tersebut.

b. Data Sekunder

Informasi yang sudah ada yang dikumpulkan dari sumber luar disebut sebagai data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang telah diterbitkan sebelumnya, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahunan untuk periode 2024–2025 dan dokumen Anggaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2024 dan 2025, yang berfokus pada program DPMPTSP.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sujarweni (2020) Metode pengumpulan data penelitian ada 3 yaitu :

Sujarweni (2020) menyatakan bahwa ada tiga cara untuk mendapatkan data penelitian:

a. Wawancara

Praktik menggunakan telekomunikasi antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh penjelasan dan informasi melalui format tanya jawab, baik secara langsung maupun offline, dengan atau tanpa penggunaan aturan. Pihak yang kompeten yang akan diwawancarai, seperti staf keuangan dan staf yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi rinci tentang strategi efisiensi, alasan di balik perbedaan kinerja anggaran dan aktual, dan dampak inisiatif efisiensi terhadap kinerja organisasi. Hasilnya, wawancara menawarkan sudut pandang yang menyeluruh dari sudut pandang praktisi dan pembuat undang-undang.

b. Observasi

Untuk memberikan gambaran yang benar tentang suatu peristiwa atau kejadian, menjawab pertanyaan penelitian, dan lebih memahami perilaku manusia, observasi merupakan kegiatan yang vital. Operasi pengelolaan anggaran Kantor Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen diamati secara langsung untuk mendapatkan hasil observasi. Gambaran faktual tentang proses implementasi efisiensi, sistem pelacakan, dan tantangan yang dihadapi selama proses realisasi anggaran diperoleh melalui observasi. Metode ini menghasilkan data yang secara akurat menggambarkan keadaan dunia nyata.

c. Studi Dokumentasi

Teknik kualitatif untuk mengumpulkan data adalah studi dokumentasi, yang memanfaatkan sejumlah besar informasi yang tersimpan dalam dokumentasi. Arsip dan catatan resmi, termasuk

*Analisis Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pra-Pep dengan Saat Penerapan Program Efisiensi
Pemerintah Berlaku di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen :
Tahun 2024 - 2025
(Hidayah, et al.)*

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Laporan Realisasi Anggaran, dan dokumen pendukung terkait lainnya, ditinjau menggunakan dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif yang andal yang dapat dibandingkan secara metodis antara periode waktu sebelum dan sesudah implementasi program efisiensi. Selain itu, dokumentasi meningkatkan akurasi dan kredibilitas penelitian dengan bertindak sebagai alat verifikasi untuk temuan observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pos-Pos Anggaran yang Mengalami Efisiensi

Program efisiensi terlihat jelas pada beberapa pos belanja operasi yang mengalami penurunan alokasi anggaran maupun realisasi secara signifikan antara tahun 2024 dan 2025.

Pos – pos	2024		2025	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa	Rp2.554.687.000	Rp2.351.084.289	Rp1.330.332.110	Rp1.266.590.004
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp462.710.000	Rp428.385.180	Rp164.081.710	Rp163.076.520
Belanja Jasa Kantor (Honorarium dan Jasa Tenaga)	Rp823.125.000	Rp759.664.884	Rp444.800.820	Rp390.361.474
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Perabot dan Kantor Lainnya)	Rp19.090.500	Rp18.996.000	Rp5.258.570	Rp5.253.058

Pembahasan

1. Belanja Barang dan Jasa

Pos ini merupakan kategori utama yang menunjukkan pengeluaran operasional keseluruhan DPMPTSP Kebumen. Data menunjukkan kebijakan efisiensi anggaran yang substansial, dengan batas anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp1.330.332.110, penurunan tajam dari batas Rp2.554.687.000 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif penghematan struktural telah mencapai lebih dari 48%. Tingkat penyerapan pos ini terus dijaga antara 92 dan 95%, menunjukkan seberapa baik program kerja telah dilaksanakan.

2. Biaya Makanan dan Minuman Rapat

Anggaran yang dialokasikan untuk pos ini menurun sebesar 64,5% pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024, menunjukkan penghematan biaya. Penurunan besar ini

Analisis Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pra-Pep dengan Saat Penerapan Program Efisiensi Pemerintah Berlaku di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen : Tahun 2024 - 2025

(Hidayah, et al.)

menunjukkan adopsi norma penggunaan yang jauh lebih hemat biaya atau penurunan frekuensi rapat tatap muka. Perencanaan yang sangat tepat dan disiplin terlihat jelas dalam realisasi anggaran 2025 sebesar Rp163.076.520 (99,3% dari anggaran).

3. Biaya Jasa Kantor (Tenaga Kerja dan Honorarium)

Pemerintah menurunkan batas anggaran untuk pos pengeluaran jasa tenaga kerja dari Rp823.125.000 pada tahun 2024 menjadi Rp444.800.820 pada tahun 2025, sehingga mengurangi konsolidasi anggaran. Anggaran sebesar Rp54.439.346 tersisa pada tahun 2025, menunjukkan penggunaan jasa tenaga kerja yang efektif di bawah batas maksimum tanpa mengganggu layanan DPMPTSP.

4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Perabot dan Kantor Lainnya)

Pos ini menunjukkan tingkat efisiensi tertinggi dalam pengadaan infrastruktur dan ruang kantor. Anggaran untuk tahun 2025 diturunkan secara drastis dari Rp19.090.500 menjadi Rp5.258.570. Penghematan ini menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas yang ada (persediaan lama) lebih penting daripada melakukan pembelian baru. Variasi realisasi yang relatif kecil menunjukkan persiapan kebutuhan fisik yang sangat cermat, dan akurasi realisasi cukup tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis perbandingan anggaran dan realisasi di DPMPTSP Kabupaten Kebumen tahun 2024-2025 dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut :

1. Efektivitas biaya yang cukup besar. Biaya operasional telah berkurang secara signifikan sejak Program Efisiensi Pemerintah (PEP) diimplementasikan pada tahun 2025, dengan penurunan rata-rata batas anggaran sebesar 40–50% di sejumlah area pengeluaran penting.
2. Tingkat realisasi masih ideal dan sangat akurat (rata-rata di atas 92%) berdasarkan akurasi perencanaan keuangan, bahkan di tengah pemotongan anggaran yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP mampu melakukan perencanaan kebutuhan riil dengan sangat matang dan disiplin.
3. Rencana penghematan yang terarah, meskipun penghematan terbesar ditemukan pada biaya pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor (turun 64,5%) dan makanan & minuman. Dengan menekankan pemanfaatan persediaan lama daripada pengadaan baru dan menerapkan kebijakan rapat digital, hal ini berhasil dicapai.
4. Stabilitas kualitas layanan pada program ini tidak menurunkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP, melainkan menciptakan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan memberikan ruang fiskal bagi program daerah yang lebih prioritas.

SARAN

1. Pemanfaatan teknologi perlu ditingkatkan pada penggunaan sistem administrasi digital (paperless) untuk menekan biaya alat tulis kantor (ATK).
2. Melakukan evaluasi rutin setiap kuartal terhadap realisasi anggaran guna memastikan bahwa efisiensi tidak menghambat target kinerja layanan perizinan dan investasi.

*Analisis Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pra-Pep dengan Saat Penerapan Program Efisiensi
Pemerintah Berlaku di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen :*
Tahun 2024 - 2025

(Hidayah, et al.)

DAFTAR PUSTAKA

- Anggeraini, M., Arka', N. A., & Agin, A. (2020). *Upaya Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasiskomputer Menggunakan Microsoft Excel Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Sistem Penjualan Dan Sistem Persediaan Barang Dagang (Studi Kasus Pada Cv. Media Sari Prima Pangkalpinang)* (Vol. 7, Number 1). JABK. www.stie-ibek.ac.id
- Inpres 01. (2025). *Presiden Republik Indonesia Salinan Interuksi Presiden Republik Indonesia*.
- Mendrofa, D. E. K., & Oci, Y. (2026). *PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN: Landasan Konseptual dan Kerangka Analisis. Kreasi Cendekia Pustaka*.
https://books.google.co.id/books?id=sUq_EQAAQBAJ
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian* (V. W. Sujarweni, Ed.). PUSTAKABARUPRESS.